



**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN RASIO EFEKTIFITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI KOTA TIDORE KEPULAUAN PEIODE 2016-2020**

Arindah Failisa Putri

Fakultas Ekonomi Universitas Nuku

(Naskah diterima: 20 November 2021, disetujui: 28 Desember 2021)

Abstract

This study aims to provide information about the Financial Performance Management of the Tidore Islands City Government. The data analysis method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. The study used is a Time Series in analyzing the required aspects, namely the Regional Financial Independence Ratio and the Effectiveness Ratio of Regional Original Income in Increasing Economic Growth in Tidore Islands City for the 2019-2020 period. Based on the results of the study, it shows that: 1) Financial Independence of the City of Tidore Islands shows a pattern of instructive relationships (very low) which illustrates that the role of the Central Government is more dominant in Regional Financial Management. It can be seen that the source of Regional Revenue from Transfer Funds is still quite high as a result of certain parties who still have not maximized regional potential gains in accordance with good targets. Which also resulted in the economic growth of the City of Tidore Islands experiencing instability and the worst occurred in 2020, which was 1.90%. 2) The Effectiveness Ratio of Regional Original Income is classified as Good because it is in the range of 90%-100% which shows Effective results so that in the Management of Regional Original Income where there is an increase in income in the last two years, namely from 2019-2020.

Keywords: *Independence Ratio, Effectiveness Ratio of Regional Original Income, and Economic Growth*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif, Menggunakan studi *Time Series* dalam menganalisis aspek-aspek yang dibutuhkan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Kota Tidore Kepulauan menunjukan Pola Hubungan Instruktif (Rendah Sekali) yang menggambarkan bahwa peran Pemerintah Pusat lebih dominan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sumber Pendapatan Daerah yaitu Dana Transfer/Dana Perimbangan masih cukup tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah sendiri, akibat dari pihak-pihak terkait yang masih belum mampu memaksimalkan perolehan potensial daerah sesuai dengan target yang diharapkan. Yang mana

mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan juga mengalami ketidakstabilan sehingga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Rasio Kemandirian Tergolong Rendah Sekali. 2) Tingkat Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan rata-rata berada dalam kisaran 90%-100% atau lebih tepatnya sebesar 99,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tergolong Efektif.

Kata kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi.

I. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dan kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan untuk merubah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah kearah yang lebih baik. Pemberlakuan sistem Otonomi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan ber-dasarkan aturan yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Per-mendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang dibahas dan disetujui oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja daerah yang mana untuk mencapai tujuan fiskal serta sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu juga membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Pendapatan Daerah adalah nilai tambah suatu daerah dari hasil perolehan daerah itu sendiri. Pendapatan Daerah berperan penting dalam menjadikan Pembangunan Daerah untuk membiayai proyek dan kegiatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas semua pendapatan yang ada di suatu daerah tersebut. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang

terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Pertumbuhan Ekonomi juga memiliki arti suatu proses Perubahan Ekonomi yang terjadi pada perekonomian yang terjadi pada perekonomian Negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, Pertumbuhan Ekonomi ini identik dengan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional.

Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota Di Provinsi Maluku Utara yang juga dalam pengelolaan keuangan daerahnya mengandalkan APBD. Kota Tidore Kepulauan memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan mencapai 6,43% lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,02% dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara sebesar 6,13% disertai penerimaan jumlah Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 914.186.293.107.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah memiliki keterkaitan terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, untuk membuktikan hal

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rasio Kemandirian Dan Pendapatan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan Periode 2016-2020”**.

II. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Permendagri Nomor 21 tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi beberapa tahap dalam prosesnya, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, laporan hingga perihal pengawasan keuangan negara maupun daerah.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pusat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk

3. menyelenggarakan urusan pemerintahan
4. daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
5. Penerimaan daerah.
6. Pengeluaran daerah.
7. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Halim dalam Nasir (2019:4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dengan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kemandirian Keuangan Daerah.

Halim dan Damayanti dalam saputra dkk, (2015:147) Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah terdiri atas beberapa perhitungan dengan menggunakan rasio, yaitu Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Widodo dan Halim dalam Novalista (2016:10), Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Pemerintah Pusat / Provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah.

Sedangkan Madiasmo dan Mahpati dalam Wiagustini dkk, (2018:2545), Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai maksimal 100%.

4. Pertumbuhan ekonomi

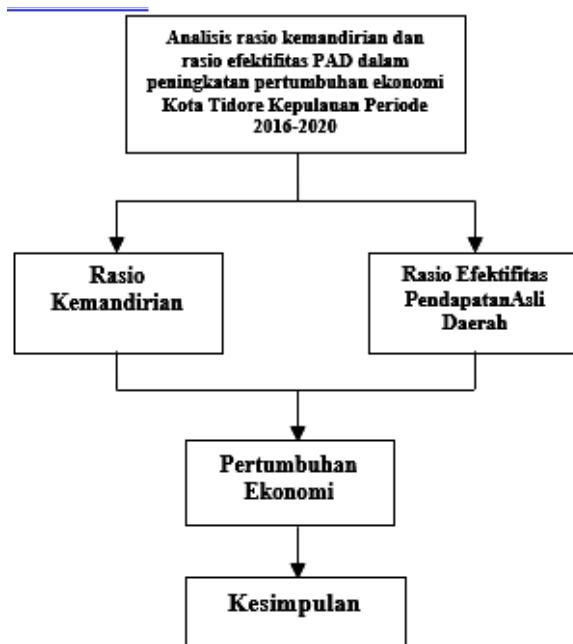
Menurut Sukirno dalam Saputra dkk, (2015:147), Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Sukirno (2015: 423) dalam kegiatan perekonomian yang baik adalah ketika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan produksi barang dan jasa yang terus berlaku disuatu negara, seperti pertambahan adanya jumlah produksi barang industri yang semakin meningkat, perkembangan pembangunan sarana dan prasarana, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan produksi barang modal serta kesempatan kerja.

Pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan yang ada atau digunakan dalam penelitian ini. Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka ke-

rangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu berdasarkan penelitian yang telah ditetapkan. maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Teknik analisis Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sugiyono (2015:207).

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Dokumentasi

Sugiyono (2016:240) menyatakan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau organisasi. Dalam melakukan penelitian, sumber dokumentasi diperoleh dari data-data Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibutuhkan dan berhubungan dengan laporan keuangan dengan melihat dokumen-dokumen serta catatan yang ada.

Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak terkait yaitu, pihak pegawai untuk mendapatkan keterangan dan informasi untuk tujuan penelitian ini.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus untuk menghimpun informasi serta data,

yang kemudian informasi dan data tersebut dianalisis kembali dengan fakta yang ada dengan dukungan studi pustakan yang mana hasil penelitiannya diperoleh dari hasil perhitungan.

Rasio Kemandirian Daerah

Analisis kemandirian keuangan daerah menurut Halim dalam Saputra (2014:09) adalah analisis yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan instruktif, pola hubungan konsultatif, pola hubungan partisipatif dan pola hubungan delegatif.

- 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkering, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat ke-

mandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Halim dalam Ramadhani (2016:90).

Tabel 3.1 Acuan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim 2004, (dalam Krest D Tolosang, 2018).

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Madiasmo dan Mahpati dalam Wiagustini dkk, (2018:2545), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PD}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah :

Tabel 2.2 Acuan untuk Tingkat Rasio

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Presentase(%)	Keterangan
100% ke atas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2011 (dalam Mahardika dan Artini,2012)

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Rasio Kemandirian Kota Tidore Kepulauan

Pengujian Rasio Kemandirian berfungsi agar mengetahui seberapa besar tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan. Semakin tinggi Rasio Kemandirian pada suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat/Provinsi semakin rendah, begitupun sebaliknya.

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian Ket (%)	Ket
2016	38.730.904.763	684.430.748.595	5,65	Ins
2017	51.241.639.551	660.647.240.010	7,75	Ins
2018	57.904.788.671	724.833.655.234	7,98	Ins

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (136-145)

	2019	67.775.406.786	752.002.282.050	9,01	Ins			

2020	81.508.249.263	808.298.106.938	10,08	Ins
	Rata-Rata	8,09	Ins	

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menunjukkan tindakan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan berupa penerimaan Pendapatan Asli Daerah kemudian dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan berdasarkan potensial daerah.

Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020.

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektifitas %	Ket
2016	38.730.904.763	41.662.243.410	92,96	Efektif
2017	51.241.639.551	60.855.811.410	84,24	Cukup Efektif
2018	57.904.788.671	60.096.952.506	96,35	Efektif
2019	67.775.406.786	62.669.911.660	108,14	Sangat Efektif
2020	81.508.249.263	69.345.279.187	117,35	Sangat Efektif
	Rata - Rata	99,8	Efektif	

Sumber: Data Diolah, 2021

PEMBAHASAN

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Diukur Menggunakan Rasio Kemandirian

Berdasarkan Hasil Analisis data Rasio Kemandirian Kota Tidore Kepulauan selama kurun waktu lima tahun terakhir, Rasio Kemandirian Kota Tidore Kepulauan berada dalam rata-rata 8,09% sehingga berada dalam kategori Instruktif atau rendah sekali. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat kecil dibandingkan Dengan Dana Perimbangan/Dana Transfer atau Bantuan Dari Pemerintah Pusat / Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pengelolaan Keuangan Daerah masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjamam daerah serta bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi seperti DBH, DAU dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Diukur Menggunakan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah diatas, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah target yang ditetapkan berdasarkan potensial daerah yang riil rata-rata efektif dengan nilai persentase 99,08%. Rasio efektivitas PAD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan data yang fluktuatif. Pada tahun 2016 efektivitas PAD sebesar 92,96% sehingga tergolong efektif. Tahun 2017 menurun drastis sebesar 84,24% sehingga tergolong cukup efektif. Kemudian pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 efektivitas PAD Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan dengan masing-masing mencapai 96,35%, sehingga tergolong efektif dan 108,14%, pada tahun 2019 dan 117,35% pada tahun 2020 sehingga keduanya tergolong sangat efektif.

Tingkat Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tergolong Baik karena berada dalam kisaran 90%-100% yang menunjukkan hasil Efektif sehingga dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dimana terjadi pe-

ningkatan pendapatan yang dalam dua Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2019-2020.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan Kota Tidore Kepulauan menunjukkan pola hubungan Instruktif (Rendah Sekali) yang menggambarkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa sumber pendapatan daerah dari dana transfer masih cukup tinggi akibat dari pihak-pihak tertentu yang masih belum memaksimalkan perolehan potensial daerah sesuai target dengan baik.
2. Tingkat Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong baik karena berada dalam kisaran 90%-100% yang menunjukkan hasil Efektif sehingga dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana terjadi peningkatan pendapatan yang dalam dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2020.
3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan dalam empat tahun dari tahun 2016-2019 mengalami kurva peningkatan pertumbuhan yang sangat baik. pada tahun

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (136-145)

2019 Pertumbuhan Ekonomi mengalahkan tingkat presentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan presentase Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Namun pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan mengalami kontraksi yang cukup parah disebabkan munculnya fenomena Covid-19 di tengah masyarakat yang semakin buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 12 Tahun 2019 pasal 2 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Sukirno, Sadono, 2002. *Makro Ekonomi Modern*, P.T.Rajawali Grafindo Persada .Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

FREEFULLPDF:

<http://www.freefullpdf.com/mobile.html#gsc.tab=0&gsc.q=Analisis%20deskriptif%20kuantitatif&gsc.sort=>

SAPPILPIL.BLOGSPOT.COM:

<http://sappilpil.blogspot.com/2015/12/mengukur-kemampuan-keuangan-suatu-daerah.html?m=1>

MEDIA NELITI.COM .2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/90744-ID-analisis-kemandirian-dan-efektivitas-keu.pdf>

BADAN PUSAT SATATISTIK TIDORE KEPULAUAN

<https://tikepkota.bps.go.id/>